

ABSTRAK

Judul :Perindungan Hukum Kelompok Minoritas (Studi Analisa Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011 Terhadap Kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia Di Jawa Timur)

Penulis : Imas Setiyawan

Kata Kunci : Pergub Jatim No. 188/94/Kpts/013/2011, UUD 45, dan Ahmadiyah

Jemaat Ahmadiyah merupakan kaum minoritas yang ada di Jawa Timur, jumlahnya sekitar 1500 orang yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, pada tahun 2011 Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan No. 188/94/Kpts/013/2011 tentang pelarangan terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur.

Hal ini tentu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur. Oleh karenanya, ada beberapa problematika yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1), bagaimana implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011 tentang pelarangan terhadap aktifitas jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, (2), bagaimana Peraturan Gubernur No 188/94/Kpts/013/2011 ditinjau dari Undang – undang 45 tentang kebebasan beragama, (3), bagaimana aktifitas jemaat Ahmadiyah 5 tahun pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/Kpts/013/2011 dikelurakan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1), terdapat berbagai implikasi yang timbul di lingkungan jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dikarenakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/Kpts/013/2011, diantaranya adalah dampak sosial, dampak keagamaan serta dampak hukum, (2), pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan terkait dengan urusan keagamaan, selain itu juga tidak sejalan dengan Undang – undang kebebasan beragama yang menjamin hak warga negara untuk menjalankan keyakinannya (3), Perkembangan jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur masa kini setelah 5 tahun menerima keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/94/KPTS/013/2011 ialah tetap melakukan aktifitas seperti biasanya, untuk rutinitas individu jemaat Ahmadiyah tetap melakukannya seperti para muslim yang lainnya, akan tetapi untuk kegiatan yang bersifat masif atau menyeluruh, jemaat Ahmadiyah terkadang masih terkendala dengan izin dari aparat keamanan.